

Era Reformasi dan Pendidikan Politik Berbasis Multikultural

Khoirul Amri Rambe

Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: khoirulamrirambe0602@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pendidikan politik berbasis multikultural dalam membentuk partisipasi warga negara yang aktif, kritis, dan inklusif di era reformasi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menelaah keterkaitan antara reformasi politik, pengembangan kurikulum, dan pendidikan multikultural sebagai instrumen strategis pembentukan budaya politik yang demokratis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan politik yang mengintegrasikan nilai-nilai multikultural mampu menumbuhkan kesadaran moral dan etis warga negara terhadap keberagaman serta mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan ini tidak hanya menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar toleran, bertanggung jawab sosial, dan berpikir kritis. Kurikulum yang adaptif, pelatihan guru yang berkelanjutan, serta pelibatan komunitas menjadi komponen penting dalam mewujudkan pendidikan politik yang transformatif. Dengan demikian, pendidikan politik berbasis multikultural berkontribusi besar dalam memperkuat fondasi demokrasi substansial dan membangun generasi yang cakap secara sosial-politik di tengah masyarakat yang majemuk.

Kata Kunci: Demokrasi; Multikultural; Pendidikan politik; Partisipasi warga negara; Reformasi.

Abstract

This study aims to examine the impact of multicultural-based political education in forming active, critical, and inclusive citizen participation in the reform era. Using a qualitative descriptive approach through literature studies, this study examines the relationship between political reform, curriculum development, and multicultural education as a strategic instrument for forming a democratic political culture. The results of the study indicate that political education that integrates multicultural values is able to foster moral and ethical awareness of citizens towards diversity and encourage active involvement in political life. This education not only instills an understanding of political rights and obligations, but also shapes the character of students to be tolerant, socially responsible, and critical thinkers. An adaptive curriculum, ongoing teacher training, and community involvement are important components in realizing transformative political education. Thus, multicultural-based political education contributes greatly to strengthening the foundations of substantial democracy and building a generation that is socio-politically capable in a pluralistic society.

Keywords: Citizen participation; Democracy; Reform; Multicultural; Political education.

How to Cite: Rambe, K. A. (2025). Era Reformasi dan Pendidikan Politik Berbasis Multikultural. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(1), 24-39.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya, mencakup berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan tradisi lokal. Data dari para antropolog menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 300 kelompok etnik yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara (Brata, 2016). Keragaman ini mencerminkan identitas multikultural bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman yang tidak dikelola secara tepat dapat menimbulkan konflik horizontal, terutama ketika nilai-nilai toleransi dan saling menghargai tidak ditanamkan sejak dini.

Pendidikan memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai kebhinekaan dan mendorong terciptanya masyarakat yang toleran. Sebagai produk kebudayaan, pendidikan tidak hanya menjadi wahana pewarisan ilmu, tetapi juga menjadi medium untuk membentuk karakter dan kesadaran sosial peserta didik. Setiap individu yang terlibat dalam proses pendidikan, baik pendidik maupun peserta didik, membawa latar belakang budaya dan sosial yang beragam. Sayangnya, dalam praktiknya, perbedaan ini kerap menjadi sumber diskriminasi, seperti perlakuan tidak adil dari guru maupun perilaku bullying antar peserta didik, yang merusak nilai-nilai persatuan dan kebersamaan.

Pendidikan multikultural muncul sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman dalam lingkungan pendidikan. Paradigma ini menempatkan keberagaman bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai kekayaan yang harus dipahami dan dihargai (Erviana & Laila, 2018). Pendidikan multikultural juga berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter, menumbuhkan sikap empati, dan mengembangkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihargai terlepas dari latar belakang sosial, budaya, maupun agama (Pratiwi, dkk, 2018). Oleh sebab itu, pendidikan multikultural menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat inklusif sejak usia dini, khususnya melalui jenjang pendidikan dasar (Retnasari, dkk, 2019).

Perubahan sosial-politik Indonesia sejak tahun 1998 yang dikenal sebagai Era Reformasi telah membuka ruang demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Reformasi menandai peralihan dari sistem pemerintahan otoriter ke arah yang lebih terbuka dan partisipatif. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dalam mengelola urusan domestik. Konteks ini menuntut hadirnya masyarakat sipil yang lebih

cerdas, kritis, dan berdaya, di mana pendidikan politik menjadi salah satu instrumen yang strategis dalam mendukung proses tersebut.

Pendidikan politik dalam sistem demokrasi memiliki peranan vital dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya, serta aktif dalam kehidupan publik. Tanpa adanya pemahaman politik yang baik, demokrasi hanya menjadi prosedur tanpa makna. Oleh karena itu, pendidikan politik harus diintegrasikan secara sistematis dalam sistem pendidikan agar mampu menciptakan masyarakat yang partisipatif dan kritis terhadap dinamika sosial-politik yang terjadi.

Sebaliknya, jika melihat ke belakang, pada masa Orde Baru pendidikan lebih dimaknai sebagai alat stabilisasi politik ketimbang pemberdayaan warga negara. Kebijakan pendidikan kala itu bersifat sentralistik, sarat dengan kontrol ideologis, dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat homogen serta patuh terhadap penguasa (Tilaar, 2002). Program-program seperti Pelita dan Kejar Buta Huruf memang berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan, tetapi muatannya diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan bukan pembentukan kesadaran kritis warga negara.

Sejarah membuktikan bahwa pendidikan tidak pernah netral dari pengaruh politik. Dalam konteks Indonesia maupun dalam sejarah peradaban Islam, pendidikan kerap kali digunakan oleh kekuasaan sebagai sarana untuk mempertahankan dominasi dan menyebarkan ideologi tertentu (Sirozi, 2010; Abdurrasyid, 1994). Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa pembangunan pendidikan politik di era reformasi tidak bisa dilepaskan dari upaya deideologisasi pendidikan masa lalu yang bersifat hegemonik.

Dengan demikian, pendidikan politik berbasis multikultural menjadi sebuah keniscayaan dalam membangun kehidupan demokratis yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kesetaraan. Kombinasi antara semangat reformasi dan pendekatan multikultural dalam pendidikan diharapkan dapat membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam merespon keberagaman dan aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi secara substantif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran mendalam mengenai hubungan antara reformasi politik dan pendidikan politik berbasis multikultural di Indonesia. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber

sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Literatur dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaian topik, rentang tahun terbit (1998–2024), serta kredibilitas sumber, seperti berasal dari jurnal terakreditasi atau penerbit resmi.

Dalam proses analisis, digunakan metode analisis tematik untuk mengelompokkan data sesuai tema-tema utama yang ditemukan, seperti perubahan kebijakan pendidikan, peran aktor pendidikan dan politik, serta dampak sosial dari pendidikan multikultural. Analisis ini dilakukan dengan membaca literatur secara menyeluruh, menandai bagian penting, lalu mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang muncul secara berulang. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana pendidikan politik multikultural dapat berkembang di era reformasi, serta sejauh mana peran pendidikan dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis dan inklusif.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pendidikan di Era Reformasi

Desentralisasi Sistem Pendidikan

Dalam kerangka otonomi daerah, pendidikan menjadi sektor strategis yang wajib dikelola oleh pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang bermutu dinilai sebagai penentu keberhasilan pembangunan suatu bangsa, karena dapat meningkatkan daya saing dan martabat nasional (Kemendikbudristek, 2021). Seiring dengan semangat reformasi, kebijakan pendidikan bergeser dari sistem yang sentralistik menuju desentralistik agar lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun, pelaksanaan desentralisasi pendidikan di berbagai daerah belum menunjukkan hasil optimal. Studi menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah belum mampu memenuhi alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003, yakni minimal 20% dari APBD, Kusumawardhani & Supriyanto, (2022). Selain itu, pengelolaan guru masih menghadapi tantangan, seperti penempatan yang tidak merata dan rekrutmen yang tidak sepenuhnya berdasarkan kompetensi, Fitria (2020).

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan idealnya memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. Sayangnya, proses ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan kelembagaan dan sumber daya di daerah. Hal ini diperparah dengan masih kuatnya praktik birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan dibanding pelayanan publik, Nasir & Kurniawan (2021).

Kesenjangan kualitas antara sekolah di daerah perkotaan dan daerah terpencil menjadi indikator nyata bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) belum sepenuhnya diterapkan dalam sektor pendidikan. Pemerintah daerah cenderung menggunakan pendekatan politis, misalnya dengan mengutamakan “putra daerah” tanpa mempertimbangkan kompetensi, sehingga berdampak pada rendahnya mutu pendidikan, Saragih (2022).

Dalam aspek pendanaan, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang bahwa minimal 20% APBD harus dialokasikan untuk sektor pendidikan, realisasinya masih jauh dari harapan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata realisasi anggaran pendidikan di kabupaten/kota hanya mencapai sekitar 10–15% dari total APBD, bahkan beberapa daerah hanya mampu mengalokasikan di bawah 10%, Afifah & Prasetyo (2021). Keterbatasan fiskal, rendahnya kapasitas perencanaan, dan lemahnya komitmen politik daerah menjadi faktor utama rendahnya pemenuhan anggaran pendidikan. Dampaknya, banyak sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan fasilitas, minim tenaga pengajar, dan ketimpangan akses pendidikan yang signifikan.

Dengan demikian, reformasi pendidikan pasca-era sentralistik belum sepenuhnya membuahkan hasil optimal. Kebijakan desentralisasi yang seharusnya membuka ruang partisipasi masyarakat dan meningkatkan efisiensi pengelolaan, justru masih dibayangi oleh praktik-praktik birokrasi lama. Upaya mewujudkan pendidikan berkualitas di era otonomi daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat tata kelola berbasis data, serta memastikan prinsip keadilan dan profesionalisme dalam setiap kebijakan pendidikan, Wulandari (2023). Evaluasi berkala, pengawasan anggaran, dan pelibatan publik harus menjadi bagian integral dalam memperbaiki sistem pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Kurikulum Berbasis Kompetensi dan integrasi nilai-nilai demokrasi

Dalam rangka memperkuat sistem pendidikan nasional yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan kurikulum, dimulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) hingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kedua kebijakan ini lahir dari pemikiran bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses kehidupan manusia itu sendiri. Melalui pendekatan ini, pendidikan diposisikan sebagai upaya untuk membantu individu mengenali potensi dirinya dan memahami realitas yang dihadapinya. Pemikiran Paulo Freire tentang “Pendidikan Kritis” menjadi landasan filosofis bahwa pendidikan harus mampu

mendorong peserta didik untuk berpikir reflektif dan kritis terhadap kehidupan, bukan sekadar menjadi objek dari sistem yang kaku, Haryanti & Wibowo (2021).

Pasca-reformasi 1998, sistem pendidikan Indonesia mengalami pergeseran paradigma, dari model sentralistik menuju desentralisasi. Kurikulum KBK yang diperkenalkan pada tahun 2004, mendorong pembelajaran aktif, partisipatif, dan berpusat pada peserta didik. Perubahan ini kemudian disempurnakan melalui penerapan KTSP pada tahun 2006, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada masing-masing satuan pendidikan untuk merancang dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik lokal, potensi daerah, serta kebutuhan sosial budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini, KTSP bukanlah pengganti KBK, melainkan kelanjutan dan penyempurnaan dari upaya untuk mengembangkan kompetensi peserta didik secara kontekstual, Musdalifah (2021).

Desentralisasi pendidikan juga diperkuat melalui penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan prinsip demokratisasi dan keadilan dalam pendidikan. Undang-undang ini membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat melalui kehadiran komite sekolah dan dewan pendidikan, yang berperan aktif dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pendidikan secara lokal. Namun demikian, pelaksanaan otonomi pendidikan belum sepenuhnya terealisasi. Masih terdapat dominasi pusat, misalnya dalam penetapan kebijakan evaluasi seperti Ujian Nasional yang dinilai mengurangi fleksibilitas daerah dalam mengembangkan standar penilaian yang relevan, Suhartono (2020).

Meskipun telah ada dorongan kebijakan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan, kenyataannya implementasi otonomi pendidikan masih menghadapi tantangan struktural dan politik. Pemerintah pusat tampak belum sepenuhnya melepas kendali, karena kekhawatiran akan melemahnya otoritas nasional dalam bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya standar nasional pendidikan yang kaku dan kebijakan evaluatif yang seragam di seluruh wilayah. Padahal, esensi dari otonomi pendidikan adalah memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis dan berkualitas, dibutuhkan sinergi antara pusat dan daerah serta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang cenderung sentralistik, Rohmah & Zulkarnain (2023).

Peran Lembaga Pendidikan dan Kebebasan Akademik

Pertama, keluarga. Keluarga merupakan media primer pendidikan politik yang paling utama dan paling urgen selama masa kanak-kanak. Keluarga memegang peran

paling fundamental dalam hal ini. Pengaruh yang paling nyata adalah bagaimana keluarga dapat membangun afiliasi dan loyalitas politik dasar anak-anaknya, membentuk rambu-rambu dasar kepribadian yang nantinya akan memberikan kontribusi dalam menumbuhkan orientasi politik anak-anak dan mengembangkan kesadaran serta pemikiran politik mereka. Keluarga juga berperan membangun persepsi politik, seperti persepsi tentang kekuasaan, yang nantinya akan berperan dalam membentuk kesadaran politiknya sebagai warga negara. Bahkan pengalaman-pengalaman individu dalam berinteraksi dengan “kekuasaan” orang tuanya, secara parsial akan menentukan cara berinteraksinya dengan kekuasaan negara di kemudian hari. Dengan kata lain keluarga merupakan media internalisasi nilai-nilai dasar dan paling awal pada diri seseorang pada masa hidupnya.

Kedua, sekolah. Sekolah berpengaruh besar dalam pendidikan politik generasi muda, dengan berperan melalui pengajaran politik dan karakter melalui sistem sekolah. Pengajaran politik dilakukan melalui mata pelajaran tertentu seperti dalam pendidikan sosial & kewarganegaraan, kebangsaan serta sejarah. Di Rusia, kurikulum sejarah digunakan untuk melakukan doktrin politik atau pengajaran dan pengkokohan ideologi politik. Di Indonesia pada era Orde Baru, mata pelajaran PPKn diisi muatan P4 yang merupakan materi pendidikan politik utama dalam rangka membangun warga negara yang baik. Belakangan dengan di berlakukannya kurikulum 2013 (Kurtilas) maka sangat memungkinkan dalam setiap mata pelajaran disisipkan nilai-nilai moral kebangsaan dan kewarganegaraan kepada peserta didik. Karakter sistem sekolah, yakni dengan suasana umum yang tercipta di sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk sensitifitas siswa terhadap dinamika kepribadian dan mengarahkan pandangan mereka terhadap bangun politik yang ada.

Pendidikan Politik Sebagai Sarana Kesadaran Demokratis

Pendidikan Politik Sebagai Alat Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pendidikan politik pada dasarnya merupakan proses yang mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam dinamika kehidupan berpolitik. Esensi dari pendidikan politik terletak pada semangat *politische engagement*, yaitu keterikatan politik yang melibatkan partisipasi sadar dalam menentukan arah kebijakan publik serta dalam peristiwa-peristiwa politik penting di tingkat lokal maupun nasional. Tujuan utama dari pendidikan politik adalah menjadikan rakyat sebagai aktor utama dalam sistem politiknya, bukan sekadar objek kebijakan yang pasif dan tunduk pada regulasi tanpa pemahaman maupun sikap kritis.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat diharapkan tidak bersikap apatis atau hanya menjadi “pengikut” yang patuh terhadap keputusan pemerintah. Sebaliknya, mereka harus menjadi warga negara yang mampu mengimbangi kekuasaan negara dengan kontrol sosial yang efektif, termasuk melalui pengawasan, evaluasi, serta dukungan yang kritis terhadap kebijakan publik. Pendidikan politik bertindak sebagai alat emansipatoris yang membebaskan warga dari belenggu ketidaktahuan, dominasi kekuasaan, maupun intervensi pihak-pihak yang merugikan kesadaran politik mereka.

Lebih dari sekadar kegiatan formal seperti pemilu atau pemberian suara dalam pemilihan umum, pendidikan politik membentuk *wawasan politik* (political insight) yang mendalam. Wawasan ini membuat partisipasi politik tidak bersifat seremonial atau simbolik, tetapi muncul dari kesadaran autentik yang lahir dari pengetahuan, penalaran, dan pemahaman akan konteks sosial-politik yang dihadapi. Dengan demikian, warga negara mampu bersikap objektif, tidak mudah terseret dalam keberpihakan emosional atau kepentingan golongan tertentu, dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas dan plural.

Gerakan pendidikan politik yang berwatak emansipatoris ini mendorong terbentuknya warga negara yang bebas menyuarakan pemikiran, tidak terbelenggu oleh tekanan atau manipulasi kekuasaan. Dalam konteks ini, pendidikan politik bukan hanya membuka kesadaran terhadap hak-hak sipil dan politik, tetapi juga menyemangati perjuangan kolektif untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi sarana strategis dalam membangun kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Melalui pendidikan politik, individu dibentuk menjadi warga negara yang *melek politik*—mereka yang sadar akan hak-haknya sebagai pemilik kedaulatan, sekaligus memahami tanggung jawabnya dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama bagi generasi muda, pendidikan politik menjadi bekal penting untuk menghadapi masa depan bangsa dan menjamin keberlangsungan demokrasi yang substansial.

Pembentukan Sikap Kritis dan Partisipatif terhadap Kebijakan Pemerintah

Kemampuan intelektual warga negara dalam memahami dan menanggapi persoalan politik dan pemerintahan merupakan aspek krusial dalam pembentukan kesadaran politik yang sehat. Dalam konteks pendidikan politik, kecakapan intelektual ini tidak hanya mencakup pengetahuan faktual, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis isu-isu secara kritis dan reflektif. Seorang warga negara yang berpikir kritis dituntut untuk memahami akar permasalahan politik, menelusuri latar belakang

historisnya, serta mengaitkannya dengan kondisi sosial-politik kontemporer. Hal ini bertujuan agar individu tidak sekadar menjadi objek dari kebijakan politik, tetapi turut aktif sebagai subjek yang mampu mempengaruhi dan mengawal jalannya pemerintahan secara konstruktif.

Dalam ranah ini, keterampilan berpikir kritis menjadi landasan utama bagi terbentuknya warga negara yang berpengetahuan (*informed citizen*), bertanggung jawab, dan sadar akan peran serta fungsinya dalam kehidupan bernegara. Namun, kecakapan berpikir kritis tersebut tidak dapat tumbuh tanpa adanya kesadaran kritis terlebih dahulu. Kesadaran kritis berfungsi sebagai pintu masuk bagi individu untuk memandang realitas sosial secara lebih jernih dan mendalam. Kesadaran ini mendorong individu untuk mempertanyakan status quo, mengenali ketimpangan yang ada, dan memetakan solusi melalui pemikiran yang rasional dan sistematis.

Untuk membentuk kesadaran kritis, terdapat tahapan-tahapan penting yang dapat diibaratkan sebagai "tangga kesadaran". Tahapan pertama adalah membangun keterlibatan masyarakat akar rumput dalam proses politik agar mereka merasa menjadi bagian dari sistem yang sedang berjalan. Tahap kedua adalah melakukan observasi sistematis terhadap kondisi sosial, termasuk identifikasi atas sumber-sumber ketertindasan atau ketidakadilan yang dialami. Tahap ketiga mengajak masyarakat untuk melakukan analisis struktural guna memahami hubungan antar sistem, misalnya keterkaitan antara kapitalisme global dengan kemiskinan lokal.

Selanjutnya, tahap keempat adalah penetapan tujuan bersama yang dilandasi oleh pemahaman yang utuh terhadap kondisi lokal maupun nasional. Tahap kelima berkaitan dengan perumusan strategi dan taktik sebagai langkah konkret dari hasil analisis sebelumnya. Terakhir, tahap keenam adalah pelaksanaan aksi yang disertai dengan refleksi secara berkelanjutan. Tanpa refleksi, aksi akan kehilangan arah dan makna; sementara refleksi tanpa tindakan hanya akan menjadi wacana kosong yang tidak berdampak. Oleh karena itu, siklus antara aksi dan refleksi menjadi kunci dalam mengembangkan kesadaran kritis yang dinamis dan berdaya transformasi. Melalui proses ini, pendidikan politik tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan sosial dalam merespons berbagai tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dampak Pendidikan Politik Berbasis Multikultural

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berada dalam fase budaya politik pasif—seperti yang digambarkan oleh model budaya politik kaula atau *subject political culture*—partisipasi warga negara cenderung terbatas pada penerimaan

hasil-hasil keputusan politik tanpa keterlibatan aktif dalam proses pembentukannya. Masyarakat mungkin peduli terhadap hasil akhir kebijakan atau pemilu, tetapi belum terbiasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara langsung. Kondisi ini menandakan bahwa kesadaran politik warga negara belum terbentuk secara merata. Dalam situasi semacam ini, kehadiran pendidikan politik yang berbasis multikultural menjadi semakin penting, karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi politik, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk karakter dan kesadaran politik yang inklusif.

Pendidikan politik yang dirancang dengan pendekatan multikultural memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai-nilai dasar demokrasi seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial. Kartono dan Kartini (2009) menekankan bahwa pendidikan politik seharusnya menjadi proses pembelajaran yang menumbuhkan nilai-nilai sosial dan etika politik, bukan sekadar mengenalkan struktur dan prosedur politik. Melalui pendidikan yang menekankan keberagaman budaya dan latar belakang, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya partisipasi politik yang adil dan setara bagi semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan secara sosial dan politik.

Lebih jauh, pendidikan politik multikultural mendorong terbentuknya *hati nurani politik*, yaitu kesadaran moral dalam berinteraksi dan mengambil sikap terhadap sesama warga negara. Ini mencakup penanaman tanggung jawab etis dalam menggunakan hak-hak politik dan dalam mengambil keputusan politik secara sadar. Dalam jangka panjang, pendekatan ini mampu membentuk individu yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga peka terhadap isu-isu ketidakadilan sosial dan diskriminasi. Pendidikan ini berkontribusi dalam membangun budaya politik yang sehat dengan menanamkan sportivitas, sikap terbuka, dan kemampuan untuk berdialog lintas perbedaan.

Selain itu, pendidikan politik berbasis multikultural juga berperan dalam menumbuhkan sikap kritis yang sehat terhadap berbagai informasi dan fenomena politik. Peserta didik diajak untuk tidak mudah terpengaruh oleh propaganda, stereotip, maupun narasi eksklusif yang kerap dimanfaatkan oleh elite politik. Mereka dibekali kemampuan untuk menganalisis secara rasional isu-isu publik yang berkembang, serta bersikap objektif dalam mengambil keputusan politik. Seperti ditegaskan oleh Banks (2015), pendidikan multikultural yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan memungkinkan terbentuknya *civic competence* yang berakar pada penghormatan terhadap pluralitas.

Dampak dari pendidikan politik multikultural ini tidak hanya tercermin pada tingkat individu, tetapi juga pada transformasi budaya politik secara kolektif. Masyarakat yang telah memperoleh pendidikan semacam ini akan menunjukkan peningkatan partisipasi dalam berbagai bentuk kehidupan publik, mulai dari pemilu hingga diskusi kebijakan publik di tingkat lokal. Mereka juga lebih siap untuk menjadi agen perubahan sosial yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan inklusivitas dalam bernegara. Dengan demikian, pendidikan politik berbasis multikultural bukan hanya mengatasi sikap apatis dan sinisme politik, tetapi juga menjadi kunci bagi terbangunnya demokrasi yang lebih partisipatif, reflektif, dan responsif terhadap keragaman.

Urgensi Memperkuat Pendidikan Politik Berbasis Konteks Lokal dan Multikultural

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi, ditandai dengan keberadaan ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok nusantara dalam populasi lebih dari 260 juta jiwa. Menurut Choirul Mahfudz (2016), kenyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural memiliki urgensi yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Selain sebagai upaya penguatan kohesi sosial, pendidikan multikultural juga diperlukan karena bangsa ini memiliki sejarah panjang konflik antarkelompok etnis dan agama yang menyisakan luka mendalam. Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia tidak hanya menghadapi krisis ekonomi dan politik, tetapi juga krisis sosial budaya yang kompleks.

Lebih lanjut, Mahfudz (2016) menjelaskan bahwa krisis sosial tersebut tampak dalam berbagai bentuk, antara lain meningkatnya potensi disintegrasi nasional akibat euforia kebebasan yang berlebihan, berkurangnya kesabaran sosial dalam menghadapi kesulitan hidup, serta meningkatnya tindakan anarkis dan kekerasan. Berbagai konflik yang dipicu oleh perbedaan etnis, agama, dan kepentingan politik, seperti yang terjadi di Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, serta Maluku, menjadi indikator nyata dari krisis tersebut.

Kamanto Sunarto (2011) juga menyoroti dampak negatif dari penerapan otonomi daerah sejak tahun 2000. Ia mengungkapkan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tidak hanya memicu gesekan antara pusat dan daerah, tetapi juga menimbulkan konflik horizontal antar komunitas lokal, termasuk antar kelompok etnis dan agama. Bahkan, gerakan separatis dan tuntutan pemekaran wilayah yang didasari pada identitas kedaerahan cenderung meningkatkan homogenitas etnis di wilayah-wilayah baru. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan menguatnya semangat

primordialisme yang bisa melemahkan semangat nasionalisme dan integrasi sosial bangsa.

Dalam konteks ini, Wasino (2011) menekankan pentingnya menyebarluaskan nilai-nilai multikulturalisme di tengah masyarakat Indonesia. Setelah runtuhnya rezim otoriter Orde Baru, Indonesia menuju era demokratisasi yang seharusnya ditopang oleh masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan budaya. Pemikiran ini sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa, yakni membangun masyarakat Indonesia yang bersatu tanpa memandang perbedaan warna kulit, suku, agama, dan status sosial.

Penyebarluasan nilai multikulturalisme perlu dilakukan melalui berbagai saluran utama seperti lembaga pendidikan, institusi politik, media massa, keluarga, organisasi keagamaan, hingga sektor pariwisata. Multikulturalisme bukan hanya pengakuan atas keragaman budaya, tetapi juga merupakan bentuk institusionalisasi terhadap kebhinekaan melalui bahasa, hukum, kebijakan pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian, multikulturalisme adalah cara pandang yang menekankan pentingnya kesetaraan, penghargaan atas perbedaan, serta kerja sama dalam satu bingkai persatuan.

Rekomendasi: Pelibatan Komunitas, Pelatihan Pendidik, Kurikulum Adaptif

Dalam konteks transformasi pendidikan di era reformasi, pengembangan kurikulum tidak lagi dapat bersifat kaku dan hanya berorientasi pada capaian akademik sempit. Pendidikan politik berbasis multikultural menuntut kurikulum yang bersifat adaptif, yakni mampu menanggapi perkembangan zaman, termasuk dinamika politik, sosial, dan kemajemukan budaya masyarakat Indonesia. Kurikulum semacam ini harus disusun dengan pendekatan yang menyeluruh, menggabungkan inovasi pedagogis serta kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan masyarakat demokratis dan multikultural.

Thaib dan Siswanto (2015) menyatakan bahwa inovasi dalam kurikulum harus didasarkan pada prinsip relevansi, kesinambungan, fleksibilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hal ini berarti, kurikulum pendidikan politik perlu dirancang agar mampu merespons kebutuhan masyarakat yang semakin plural, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Peninjauan kurikulum secara berkala menjadi langkah strategis agar isinya tetap relevan dengan perubahan sosial dan politik. Lebih dari itu, proses ini tidak boleh bersifat elitis, melainkan harus melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan: mulai dari guru, kepala sekolah, hingga komunitas lokal, sehingga substansi pendidikan politik benar-benar mencerminkan konteks budaya dan sosial tempat peserta didik berada.

Azis et al. (2024) menegaskan pentingnya penerapan manajemen partisipatif dalam penyusunan kebijakan kurikulum. Pelibatan aktif para pendidik, masyarakat, serta organisasi pendidikan akan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam proses pendidikan itu sendiri. Dalam kerangka pendidikan politik berbasis multikultural, pelibatan ini penting bukan sekadar untuk menyusun isi kurikulum, tetapi juga untuk menanamkan nilai penghargaan terhadap keberagaman, dialog antarbudaya, dan kesetaraan sosial.

Di sisi lain, responsivitas kurikulum terhadap berbagai perubahan, baik dari dalam institusi pendidikan maupun pengaruh luar seperti perkembangan teknologi dan ketegangan sosial-politik, menjadi keharusan. Putra et al. (2023) menggarisbawahi bahwa kurikulum yang ideal bukan hanya menargetkan keberhasilan akademik, melainkan juga membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta kesadaran etis sebagai bekal untuk hidup di tengah masyarakat plural. Dalam pendidikan politik, hal ini sangat krusial agar peserta didik tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sosial yang penuh perbedaan.

Selain pembaruan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik menjadi aspek yang tidak kalah penting. Guru sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pendidikan politik perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan yang mencakup pendekatan multikultural, strategi pembelajaran partisipatif, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Pelatihan ini harus bersifat aplikatif dan berbasis kebutuhan lapangan, bukan sekadar seremonial. Komunitas juga memegang peran penting dalam menopang pelaksanaan pendidikan politik yang inklusif. Melalui keterlibatan orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal, sekolah dapat menjadi ruang pembelajaran yang berakar kuat pada nilai-nilai kebudayaan lokal sekaligus terbuka terhadap pluralitas.

Dengan mengintegrasikan kurikulum yang adaptif, pelatihan guru yang berkelanjutan, serta partisipasi komunitas, pendidikan politik era reformasi berbasis multikultural dapat menjadi wahana strategis untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya melek politik, tetapi juga memiliki sikap demokratis, toleran, dan bertanggung jawab sosial. Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi yang mendorong partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara aktif dan setara.

Kesimpulan

Pendidikan politik berbasis multikultural merupakan sarana strategis untuk mentransformasi budaya politik masyarakat dari yang semula pasif menuju lebih aktif,

reflektif, dan inklusif. Dalam masyarakat yang masih didominasi budaya politik kaula, pendidikan politik berfungsi bukan hanya untuk memberikan pengetahuan politik semata, tetapi juga sebagai proses pembentukan nilai-nilai demokratis seperti kejujuran, sportivitas, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan multikultural, pendidikan politik mampu menumbuhkan kesadaran moral dan hati nurani politik warga negara, sekaligus membentuk daya kritis terhadap berbagai informasi dan fenomena politik yang berkembang. Dampak dari proses ini tampak dalam meningkatnya partisipasi publik yang lebih bermakna, kemampuan berpikir rasional, serta kesiapan individu untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, pendidikan politik multikultural menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Afifah, L., & Prasetyo, E. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Pendidikan dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 20–33.
- Asmara, A. (2022). Desentralisasi Pendidikan dan Implikasinya terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 8(1), 55–66.
- Azis, A., Nurashah, N., Kusnafizal, T., Sakdiyah, S., & Alfian, A. (2024). Information and communication technology in the learning process. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(1), 158-170.
- Banks, J. A. (2015). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching* (6th ed.). New York: Routledge.
- Brata, I. B. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perikat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*, 05(01), 9–16.
- Kartono, K., & Kartini, R. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Instrumen Penguatan Demokrasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Erviana, V. Y., & Fatmawati, L. (2018). URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI WADAH STRATEGIS UNTUK MENANAMKAN KARAKTER TOLERANSI DI SEKOLAH DASAR. *University Research Colloquium*, 297–302.
- Farida, U. (2022). Refleksi Pemikiran Paulo Freire dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Pendidikan*, 5(2), 122–134.
- Fitria, Y. (2020). Manajemen Pendidikan dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 150–162.
- Haryanti, S., & Wibowo, A. (2021). Reformasi Kurikulum dan Tantangan Pendidikan Berbasis Kompetensi di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 10(1), 78–90.

- Kartono, & Kartini. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kemendikbudristek. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020–2024*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Kusumawardhani, A., & Supriyanto, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–57.
- Mahfudz, Choirul. (2016). *Pendidikan Multikultural dalam Konteks Keindonesiaan*. Surabaya: Unesa University Press.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Musdalifah, R. (2021). KTSP sebagai Instrumen Otonomi Pendidikan: Sebuah Tinjauan Filosofis dan Praktis. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 12(3), 201–215.
- Nababan, R. (2021). Pendidikan Politik Multikultural dalam Penguatan Warga Negara Demokratis. *Jurnal Demokrasi dan Kebangsaan*, 3(1), 25–36.
- Nasir, A., & Kurniawan, R. (2021). Desentralisasi Pendidikan dan Tantangan Pemerataan Mutu di Daerah Tertinggal. *Jurnal Kependidikan*, 9(2), 130–141.
- Nasution, H. (2022). Peran Pendidikan Politik dalam Membangun Budaya Politik Partisipatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 19(2), 141–153.
- Pratiwi, I. A., Masfuah, S., & Rondli, W. S. (2018). Pendidikan Multikultural Berbantuan Metode Pictorial Riddle Untuk Meningkatkan Karakter Kreatif dan Bersahabat Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 8(2), 109–119.
- Putra, S., Yulaekah, Y., Syaifuddin, M., & Andriani, T. (2023). Manajemen strategi pengembangan kurikulum dan interaksi edukatif. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 605–613.
- Retnasari, L., Hidayah, Y., Guru, P., Dasar, S., Keguruan, F., & Dahlan, U. A. (2019). Pendidikan Multikultural pada Progam Kurikuler di Sekolah Dasar. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 438–448.
- Riant Nugroho (2008). *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohmah, N., & Zulkarnain, R. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Sentralistik dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(2), 143–156.
- Saragih, R. (2022). Implikasi Politik Lokal dalam Penempatan Guru: Studi Kasus di Sumatera Utara. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6(1), 25–36.
- Sirozi, M., (2010). *Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suhartono, E. (2020). Dinamika Implementasi KTSP dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(4), 233–245.

- Sunarto, Kamanto. (2011). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Tilaar , H.A.R. & Riant Nugroho (2008). *Kebijakan Pendidikan, Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasino. (2011). *Multikulturalisme dalam Konteks Indonesia: Isu, Tantangan dan Solusi*. Semarang: UNNES Press.
- Widiyanti, M., Prasetya, H., & Lestari, S. (2021). Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Demokratisasi dan Keadilan Sosial. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 30(2), 178–190.
- Wulandari, R. (2023). Tata Kelola Pendidikan dan Penguatan Kapasitas Daerah Pasca Reformasi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 15(1), 89–104.